

BAGIAN EMPAT
KREATIVITAS
MENGELOLA SEKOLAH

PROBLEM PUNGUTAN SEKOLAH

Setiap musim pendaftaran peserta didik baru tiba, selain disibukkan urusan teknis pendaftaran anak, para orang tua harus bersiap-siap mengeluarkan dana untuk kepentingan donasi pendidikan. Biasanya pungutan dana pendidikan dari orang tua oleh sekolah senantiasa mengiringi masa pendaftaran ini. Padahal pemerintah, mulai pusat hingga provinsi, kabupaten, dan kota sangat gencar mengampanyekan pendidikan gratis melalui slogan “sekolah harus bisa.” Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengeluarkan larangan menarik donasi pendidikan dari orang tua. Ini berarti pendidikan harus benar-benar gratis dan bebas dari segala bentuk pungutan. Pertanyaannya, benarkah pendidikan gratis dapat terwujud sehingga orang tua terbebas dari segala bentuk pungutan?

Jika pertanyaan tersebut diajukan pada sekolah swasta dan negeri rasanya jawaban yang diberikan relatif sama; pendidikan gratis hanya ada dalam kampanye. Sementara dalam realitanya, sekolah masih membutuhkan donasi dari orang tua untuk mencukupi dana operasional. Bagi sekolah swasta, persoalan donasi pendidikan memang tidak banyak men-

imbulkkan masalah. Bahkan sekolah swasta dapat memaksimalkan donasi pendidikan dari orang tua dengan jaminan peningkatan mutu layanan akademik. Sementara untuk sekolah negeri, persoalan donasi pendidikan dapat menjadi masalah sensitif. Ini karena semua dana yang dibutuhkan sekolah negeri dikatakan telah dipenuhi pemerintah.

Tetapi yang perlu ditanyakan adalah apakah semua anggaran yang dibutuhkan sekolah telah dipenuhi pemerintah? Jawabannya ternyata belum. Bahkan beberapa sekolah negeri mengkhawatirkan terjadi kelambanan peningkatan mutu akibat belum optimalnya anggaran yang dikucurkan pemerintah. Hal ini jelas menjadi dilema bagi sekolah negeri.

Menanggapi problem tersebut pemerintah melimpahkan kesalahan pada sekolah karena dianggap kurang jeli dalam membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Akibat tidak dimasukkan dalam RAPBS maka beberapa kegiatan yang direncanakan sekolah tidak dapat dibiayai. Alasan ini dapat dimaklumi karena proses penganggaran kegiatan saat ini memang berbasis pada kinerja. Namun demikian secara jujur harus diakui bahwa masih banyak sekolah yang belum terbiasa membuat RAPBS yang terencana dan terukur.

Karena itu, ketika ada pelarangan penarikan donasi, pihak sekolah pun kelimpungan. Apalagi selama ini ditenngarai bahwa donasi pendidikan kemudian dijadikan “bisnis” sekolah. Pertanggungjawaban administrasi keuangan yang diperoleh dari donasi pun tidak serumit anggaran yang diperoleh dari pemerintah. Kondisi ini menjadikan sekolah nyaman menarik donasi dari orang tua dengan alasan peningkatan mutu, fasilitas, dan kegiatan ekstra.

Perdebatan mengenai donasi pendidikan merupakan cermin kebingungan kelompok elit, pejabat publik,

dan praktisi pendidikan. Kelompok elit dan pejabat publik merasa bingung karena ternyata biaya pendidikan terus meningkat. Sementara rakyat berada dalam situasi kehidupan sosial ekonomi yang semakin sulit. Padahal masalah pendidikan merupakan amanah konstitusi yang harus ditunaikan pemerintah.

Jika mau melakukan refleksi ke belakang, maka para pejabat publik ini pasti akan malu karena ternyata belum dapat memenuhi janji-janji politik yang pernah diutarakan. Di antara janji politik yang sering dikemukakan adalah menyelenggarakan pendidikan gratis. Karena itu pemerintah pun berkomitmen mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen untuk bidang pendidikan. Dengan dana sebesar ini, maka rakyat seharusnya dibebaskan dari seluruh pungutan. Faktanya, janganakan menyelenggarakan pendidikan gratis. Realitas malah menunjukkan bahwa biaya pendidikan semakin mahal.

Dalam kondisi tertekan karena belum mampu merealisasikan janji politiknya, pemerintah pun menempuh kebijakan melarang penarikan donasi. Sangat disayangkan, banyak sekolah yang merespon kebijakan ini dengan cara reaksioner. Misalnya, dengan menyatakan bahwa program peningkatan mutu akan berjalan lambat jika penarikan donasi dilarang. Bahkan ada juga sekolah yang mengancam akan meniadakan kegiatan ekstrakurikuler yang semestinya menjadi wadah pembinaan bakat dan ajang prestasi peserta didik. Tentu saja cara yang ditempuh pihak sekolah ini tidak pada tempatnya. Jika ini yang dilakukan maka yang dirugikan tentu peserta didik karena tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal.

Ancaman beberapa sekolah untuk mengurangi kegiatan peningkatan mutu dan ekstrakurikuler akibat larangan menarik donasi menunjukkan tipologi kepemimpinan yang sangat

birokratis. Tipe kepemimpinan seperti ini biasanya senantiasa menggantungkan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari atasan. Tidak ada inovasi dan kreativitas yang muncul dari pemimpin yang birokratis ini.

Pola berpikir linear dari kepala sekolah-birokrat ini akan selalu menempatkan donasi dari pemerintah dan orang tua sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa masih banyak kelompok masyarakat lain, seperti dunia usaha dan industri yang dapat diajak membantu sekolah.

Fenomena ini jelas sangat bertentangan dengan semangat mengimpelementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang telah sekian lama digalakkan. MBS mengajarkan prinsip pelimpahan wewenang yang seluas-luasnya pada sekolah untuk membuat keputusan sesuai kebutuhan. Tentu saja keputusan ini harus terlebih dulu dibicarakan melalui proses *sharing* dengan *stakeholder* sekolah.

Di dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan sekolah, seorang kepala sesungguhnya dapat memaksimalkan fungsi komite. Termasuk dalam merespon larangan menarik donasi dari orang tua, kepala sekolah dapat membicarakan dengan komite tanpa harus mengorbankan hak tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Tenaga pendidik tentu harus selalu meng-*upgrade* kemampuan dan wawasannya agar tidak ketinggalan. Demikian juga tenaga kependidikan berhak mendapat pembinaan berupa tambahan keterampilan. Sementara peserta didik berhak mendapatkan layanan terbaik dari sekolah. Untuk mewujudkan kondisi ini tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Yang menyedihkan, ternyata fungsi komite di sekolah belum banyak diberdayakan. Komite baru difungsikan jika ada program mencairkan dana bantuan seperti Bantuan Operasion-

al Sekolah (BOS), *block grant*, dan hibah. Bahkan di beberapa tempat, seringkali terjadi hubungan yang tidak harmonis antara kepala sekolah dan komite. Kepala sekolah seringkali memosisikan komite sebagai pengawas kinerja sehingga dapat membahayakan posisinya.

Padahal dalam kasus polemik donasi pendidikan, posisi komite sangat strategis. Komite dapat menjadi penghubung keinginan sekolah dan *stakeholder*. Komite sekolah dapat memainkan peran agar mereka yang kaya mau memberikan donasi lebih guna membantu sekolah. Sementara mereka yang miskin dapat merasakan subsidi dari yang kaya sehingga bebas biaya pendidikan. Yang terpenting dan harus dilakukan sekolah adalah memberikan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel pada *stakeholder* sekolah.

LARANGAN PENDAFTARAN LEBIH AWAL

Setiap menjelang tahun ajaran baru, para orang tua berancang-ancang memilihkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Pihak sekolah pun bersiap melakukan penerimaan agar dapat memperoleh peserta didik sebagaimana yang ditargetkan. Setiap sekolah tentu berusaha menarik minat calon wali peserta didik dengan menunjukkan keunggulannya. Beragam *branding* yang menunjukkan keunggulan pun ditawarkan sekolah untuk menarik minat. Ada yang mem-*branding* sebagai sekolah prestasi, sekolah kreatif, sekolah anak shalih, sekolah integral, sekolah terpadu, sekolah alam, dan yang tidak pernah ketinggalan sukses ujian nasional 100 persen.

Dibanding sekolah negeri, sekolah swasta pasti akan melakukan promosi yang lebih gencar. Ini karena sekolah swasta sangat mengandalkan donasi dari orang tua untuk mendukung pengembangan pendidikan. Jumlah peserta didik bagi sekolah swasta sangat berpengaruh pada biaya operasional. Karena itu dapat dipahami jika banyak sekolah swasta menaruh perhatian yang sangat besar pada penerimaan peserta didik baru.

Jika tidak sukses, bukan hanya biaya operasional sekolah yang terganggu. Ancaman yang lebih besar adalah penutupan atau pencabutan ijin karena ada regulasi mengenai

jumlah rombongan belajar minimal yang harus dipenuhi sekolah. Yang menarik, kompetisi saat masa pendaftaran peserta didik baru tidak hanya terjadi antar sekolah swasta, tetapi juga antara sekolah swasta dengan sekolah negeri yang menawarkan program pendidikan gratis.

Masa ini sering diwarnai tarik menarik kepentingan antara dinas pendidikan (Dispendik) dan sekolah swasta. Persoalan yang diperdebatkan seputar mekanismenya. Secara resmi Dispendik kabupaten dan kota umumnya melarang sekolah melakukannya sebelum waktunya. Sementara sekolah swasta dengan alasan ingin memanfaatkan kepercayaan dan minat masyarakat telah melaksanakannya jauh hari. Dengan sistem *indent*, sekolah swasta telah melaksanakannya sepanjang tahun. Bahkan saat ini beberapa sekolah swasta favorit di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, telah menyelesaikan alias sudah tidak lagi menerima pendaftaran peserta didik. Yang menarik, sistem *indent* juga memberi peluang pada orang tua mendaftarkan anaknya untuk tahun pelajaran yang akan datang. Tidak heran jika ada sekolah swasta unggulan telah memiliki sejumlah calon peserta didik untuk beberapa tahun mendatang.

Akhir-akhir ini memang terjadi kesadaran yang luar biasa dari masyarakat untuk memilihkan pendidikan anak di sekolah berkualitas. Ini jelas realitas yang patut disyukuri karena bisa menjadi peluang bagi sekolah, terutama sekolah swasta berkategori unggulan. Bahkan di kalangan masyarakat kelas sosial ekonomi menengah ke atas, biaya pendidikan super mahal yang ditentukan sekolah swasta unggulan tidak lagi dipersoalkan. Yang terpenting bagi mereka, anaknya dapat memperoleh layanan pendidikan yang terbaik.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bermutu bagi anak tampaknya terus meningkat. Bahkan ada sebagian orang tua yang mempersepsi bahwa sekolah yang

mematok donasi tinggi pasti diikuti pelayanan akademik yang maksimal. Kelompok masyarakat yang berpandangan demikian inilah yang ingin dimanfaatkan sekolah swasta unggulan. Akibatnya muncul kesan komersialisasi pendidikan yang ditunjukkan dengan mahalnya biaya sekolah. Tetapi, sepanjang biaya pendidikan itu diperoleh dari *stakeholder* yang berkomitmen tinggi untuk mengembangkan pendidikan, sesungguhnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Yang penting, pihak sekolah dapat mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, transparan, dan akuntabel. Akan lebih baik jika sekolah bertipe ini memberikan beasiswa bagi anak-anak yang cerdas tetapi dari keluarga miskin.

Harus diakui, jumlah sekolah swasta berkategori unggulan memang belum banyak. Umumnya sekolah swasta itu berkategori kecil dengan *stakeholder* kelas menengah ke bawah. Sekolah tipologi ini pasti mengalami kesulitan bersaing untuk mendapat peserta didik saat pendaftaran. Apalagi pemerintah kini banyak membuat kebijakan yang terasa kurang berempati pada sekolah swasta: pendirian sekolah baru, ketidakadilan dalam pendanaan, dan kampanye pendidikan gratis. Bagi sekolah swasta unggulan, kebijakan ini pasti tidak akan berdampak karena punya *stakeholder* yang mapan. Tetapi, bagi sekolah swasta berkategori kecil, beberapa kebijakan pemerintah itu terasa sangat berat.

Karena kompetisi yang begitu ketat untuk mendapatkan peserta didik baru, sekolah swasta berkategori besar dan kecil berinisiatif untuk melakukan pendaftaran lebih awal. Bagi sekolah swasta, jika ia dilakukan berdasarkan ketentuan Dispendik maka sangat mungkin tidak akan memperoleh peserta didik seperti yang ditargetkan. Ini karena mayoritas masyarakat masih menempatkan sekolah negeri sebagai pilihan utama dengan alasan biaya pendidikan yang murah dan bahkan gratis. Apalagi jika sekolah negeri itu berkategori

unggulan dan favorit. Sekolah negeri berkategori ini pasti akan diserbu orang tua. Sementara sekolah swasta harus menerima kenyataan dijadikan alternatif yang kesekian.

Faktanya, banyak orang tua yang menjadikan sekolah swasta sebagai alternatif jika anaknya benar-benar ditolak di negeri. Kondisi ini jelas sangat tidak menguntungkan sekolah swasta. Apalagi waktu penftaran yang ditentukan pemerintah biasanya sangat mepet dengan dimulainya tahun pelajaran baru. Karena itulah banyak sekolah swasta melakukannya sebelum dibuka secara resmi oleh pemerintah. Dengan demikian menjadi tidak relevan larangan untuk melaksanakan pendaftaran mendahului ketentuan Dispendik.

Pemerintah harus menyadari, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak akan pernah dapat dilakukan sendiri. Ini karena pemerintah memiliki keterbatasan pendanaan, sarana prasarana, dan sumber daya. Padahal menurut amanah konstitusi pemerintah berkewajiban memberikan layanan terbaik bagi warga bangsa untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Pada konteks inilah pemerintah membutuhkan pihak swasta untuk bersinergi dalam melaksanakan tugas mulia, yaitu mendidik anak.

Dengan menjadikan pihak swasta sebagai mitra, maka tugas mendidik anak akan terasa ringan. Ini berarti yang dibutuhkan adalah mensinergikan program pemerintah dan swasta sehingga terwujud sistem pendidikan nasional yang unggul. Sudah saatnya, paradigma berkompetisi antara pemerintah dan swasta diubah menjadi bersinergi. Dalam kaitan inilah pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih berempati pada sekolah swasta, termasuk peraturan mengenai pendaftaran peserta didik baru.

PENDIDIKAN GRATIS DAN NASIB SEKOLAH SWASTA

Kampanye pendidikan gratis melalui slogan “sekolah harus bisa” yang dicanangkan pemerintah benar-benar menyisakan persoalan serius bagi sekolah swasta. Hal ini dikarenakan selama ini sekolah swasta banyak mengandalkan donasi pendidikan dari masyarakat, terutama wali peserta didik. Tegasnya, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan swasta selama ini sangat bergantung pada komitmen kelompok-kelompok di masyarakat yang menjadi *stakeholder* sekolah.

Sejarah perkembangan sekolah swasta juga selalu tumbuh dari masyarakat. Bahkan tidak sedikit sekolah swasta yang kini menjelma menjadi besar dan mapan berasal dari wakaf seseorang yang kemudian dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh para pengurusnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi sekolah swasta sesungguhnya lebih banyak ditentukan militansi perjuangan para guru, kepala sekolah, dan pengurusnya.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi bagian dari bidang yang dapat dikelola secara profit. Fenomena ini dapat diamati melalui bebera-

pa sekolah swasta yang tumbuh dan berkembang dengan dimodali sekelompok orang kaya yang bergabung dalam suatu yayasan pendidikan. Segala kebutuhan operasional pendidikan sekolah ini ditanggung oleh yayasan.

Sebagai timbal balik, yayasan menarik donasi pendidikan dari *stakeholder* sekolah. Bahkan tidak sedikit sekolah swasta ini berhasil menjadi lembaga pendidikan berkategori besar dan mapan. Sekolah berkategori inilah yang kemudian berani menentukan biaya pendidikan dalam jumlah yang sangat tinggi karena dijual adalah layanan akademik dan non-akademik yang memuaskan bagi *stakeholder*. Bahkan dapat dikatakan bahwa layanannya telah melebihi standar yang ditentukan oleh pemerintah.

Bagi sekolah swasta berkategori besar dan mapan, kampanye pendidikan gratis barangkali tidak banyak berpengaruh. Sebab, sekolah berkategori ini biasanya telah memiliki pelanggan tersendiri. Mayoritas pelanggan sekolah ini adalah kelompok menengah ke atas. Persoalan donasi pendidikan bagi *stakeholder* sekolah swasta berkategori besar dan mapan tentu tidak lagi menjadi masalah. Bahkan sebagian besar *stakeholder* sekolah ini meyakini bahwa lembaga pendidikan yang berkualitas memang seharusnya dijual dengan harga yang mahal.

Sebaliknya, lembaga pendidikan yang dijual murah biasanya berkualitas rendah. Mereka tidak pernah mempersoalkan mahalnnya biaya pendidikan. Sebab, bagi mereka yang penting adalah kepuasan peserta didik dan orang tua karena mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Fenomena ini dapat diamati dari beberapa sekolah swasta berkategori besar dan mapan seperti, al-Hikmah, al-Falah, Sekolah Alam Insan Mulia, serta beberapa sekolah di bawah binaan Muhammadiyah dan Ma'arif.

Tetapi, rasanya masih sangat sedikit sekolah swasta yang berkategori besar dan mapan. Kebanyakan sekolah swasta yang ada saat ini berkategori menengah ke bawah. Bahkan dapat dikatakan bahwa mayoritas sekolah swasta di beberapa daerah adalah berkategori kecil dengan fasilitas seadanya. Biasanya donasi pendidikan sekolah bertipe ini bersumber dari masyarakat dan pemerintah. Dana dari masyarakat dihimpun melalui tarikan dalam bentuk SPP, dana pembangunan, sumbangan kegiatan pembelajaran intra dan ekstrakurikuler, dan donatur *stakeholder*.

Sementara dana bantuan pemerintah yang diterima dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beberapa *block grant* digunakan untuk menggaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan sarana prasarana. Akibat kampanye pendidikan gratis yang digelorakan pemerintah, mayoritas sekolah swasta berkategori kecil harus membebaskan peserta didik dari segala bentuk tarikan. Hal ini dilakukan karena pemerintah menganggap telah banyak memberikan bantuan operasional pendidikan, termasuk pada seluruh sekolah swasta.

Yang menjadi persoalan sekolah swasta berkategori kecil adalah jika bantuan pemerintah tidak diterima secara rutin. BOS memang diberikan setiap bulan berdasarkan jumlah peserta didik. Tetapi, berdasarkan pengalaman beberapa sekolah menunjukkan bahwa BOS tidak mesti keluar setiap bulan. Bahkan terkadang pencairan dana BOS mengikuti jadwal pemerintah dalam pencairan anggaran dalam setiap tahun.

BOS juga menghadirkan persoalan bagi sekolah swasta yang memiliki jumlah rombongan belajar kecil. Jika mengandalkan BOS tentu tidak mencukupi kebutuh-

an menggaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Belum lagi dana operasional sekolah yang secara berkala harus dikeluarkan. Fakta ini jelas menunjukkan problem riil yang dihadapi sekolah swasta ketika berhadapan dengan kampanye pendidikan gratis.

Tantangan terbesar yang segera dihadapi sekolah swasta berkaitan dengan kampanye pendidikan gratis adalah musim pendaftaran peserta didik baru yang kini sedang dilaksanakan. Sekolah swasta harus bersaing memperebutkan peserta didik baru dengan sekolah pemerintah dan sekolah swasta lain. Sekolah pemerintah dengan daya tarik berupa SPP gratis, fasilitas memadai, dan sumber daya manusia yang mapan, akan tetap menjadi primadona bagi masyarakat.

Dengan posisi seperti ini sekolah pemerintah akan berada di atas angin. Bahkan sekolah pemerintah dapat dengan mudah memperoleh peserta didik baru yang berkualitas melalui sistem seleksi yang sangat ketat. Sementara sekolah swasta, terutama yang berkategori kecil, harus menerima kenyataan mendapatkan peserta didik baru dengan kualitas yang seadanya. Bagi sekolah swasta, memperoleh peserta didik baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan sudah harus disyukuri. Sebab, ada banyak sekolah swasta yang harus menerima kenyataan tidak memperoleh jumlah peserta didik sebagaimana yang diharapkan.

Bagi sekolah swasta, jumlah peserta didik akan sangat menentukan besaran dana operasional yang dapat dihimpun. Jika jumlah peserta didik berlebih maka dipastikan pemasukan donasi pendidikan akan cukup untuk membiayai operasional pendidikan. Bahkan sebagian dana dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi guna mengembangkan sekolah. Tetapi, jika jumlah peserta didik berkurang,

maka pengurus harus berusaha mencari kekurangan dana dari sumber lain. Fakta inilah yang menyebabkan banyak sekolah swasta mempertaruhkan eksistensinya pada setiap musim pendaftaran peserta didik baru.

Berkaitan dengan kampanye pendidikan gratis, maka yang perlu dilakukan sekolah pemerintah adalah berempati pada sekolah swasta ketika melakukan pendaftaran peserta didik baru. Sekolah pemerintah dengan fasilitas sekolah gratis harus dapat menahan diri untuk tidak terlalu bernafsu memperoleh peserta didik sebanyak mungkin. Yang perlu dilakukan adalah menerima peserta didik sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pemerintah dapat memilih sekolah swasta sesuai dengan yang dikehendaki.

Sikap berempati ini perlu dikembangkan sebab tidak mungkin fasilitas sekolah pemerintah mampu menampung seluruh peserta didik. Di sinilah fungsi sekolah swasta sebagai patner sekolah pemerintah dapat bersinergi melakukan tugas mulia yang diamanahkan konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih dari itu, yang juga perlu dilakukan pemerintah adalah mendistribusikan anggaran pendidikan secara lebih proporsional dan berkeadilan bagi sekolah pemerintah dan sekolah swasta. Jika sikap berempati ini tidak dijalankan maka pemerintah berarti telah membunuh kiprah sekolah swasta.

MENYIKAPI KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS

Sejak Januari 2011, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program sekolah gratis untuk SD, SMP, dan SMA. Program ini terus digulirkan pada 2012. Tujuannya adalah memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengakses pendidikan. Sebagai konsekwensinya, pemerintah telah menyiapkan bantuan operasional pendidikan (Bopda) yang jumlahnya ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan. Dengan Bopda maka sekolah diharapkan tidak lagi menarik donasi dari orang tua, termasuk sumbangan pengembangan pendidikan (SPP).

Kebijakan sekolah gratis jelas menjadi angin segar bagi masyarakat. Orang tua pun tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menyekolahkan anaknya. Ini karena kebijakan sekolah gratis menekankan bahwa orang tua dibebaskan dari segala bentuk pungutan. Bagi pemerintah, kebijakan ini sekaligus menjadi payung hukum untuk memaksa orang tua agar menyekolahkan anaknya. Kebijakan ini juga sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di samping memberikan dampak positif, kebijakan sekolah gratis sesungguhnya banyak menyimpan persoalan. Bukan han-

ya sekolah swasta, kebijakan ini juga berdampak pada sekolah negeri. Ini karena sekolah negeri pasti akan mengalami kendala, terutama dalam kaitan dengan keinginan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Karena terkendala keterbatasan anggaran akibat tidak boleh menarik donasi, maka sekolah pun menerapkan kebijakan untuk memangkas beberapa kegiatan yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi peserta didik. Kondisi ini jelas sangat berbahaya karena dapat mengurangi kualitas pendidikan.

Dampak kebijakan sekolah gratis akan semakin terasa bagi sekolah negeri yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sebab, sekolah RSBI jelas membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan operasional dan penjaminan mutu. Jika ini yang terjadi maka yang dirugikan adalah *stakeholder* pendidikan, terutama peserta didik karena semestinya memperoleh layanan pendidikan yang maksimal. Kekhawatiran *stakeholders* terhadap penurunan layanan mutu pendidikan seiring dengan kebijakan sekolah gratis rasanya sangat beralasan.

Karena itu pemerintah perlu menjelaskan kebijakan pendidikan gratis ini secara jujur dan transparan. Jangan karena termotivasi ingin menyelenggarakan pendidikan gratis, tetapi program peningkatan mutu malah berjalan lambat akibat sekolah tidak boleh menarik donasi dari orang tua. Apalagi jika kebijakan ini dilatarbelakangi motif politik ingin membangun bahwa pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan gratis. Padahal faktanya tidak pernah ada pendidikan yang benar-benar gratis. Fakta ini terjadi di sekolah negeri dan swasta.

Dalam rangka memberikan layanan yang terbaik terhadap *stakeholders*, pihak sekolah sesungguhnya dapat memaksimalkan fungsi komite. Termasuk dalam merespon larangan pemerintah untuk menarik donasi dari orang tua. Komite dapat men-

jadi penghubung keinginan sekolah dengan *stakeholder* untuk mengembangkan pendidikan.

Dalam situasi pendidikan yang semakin kompetitif sesungguhnya banyak orang tua yang tidak lagi peduli dengan persoalan biaya pendidikan asalkan anaknya mendapatkan layanan terbaik. Hal ini dapat dibuktikan dengan eksistensi sekolah-sekolah swasta berkategori unggulan yang tidak pernah sepi peminat meski biaya pendidikannya sangat tinggi. Bagi orang tua yang *high class* ini, sekolah yang menetapkan biaya murah dianggap tidak berkualitas karena pasti tidak diurus dengan serius.

Sebaliknya, sekolah yang mahal dimaknai sebagai pendidikan bermutu tinggi. Hal ini tentu dapat menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk menggaet orang tua peserta didik yang kaya dan berkomitmen baik terhadap pengembangan pendidikan. Yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi dan melakukan pendekatan pada mereka.

Dalam konteks inilah komite sekolah dapat memainkan peran agar orang tua yang kaya mau memberikan donasi lebih guna membantu sekolah. Sementara mereka yang miskin dapat merasakan subsidi sehingga bebas biaya pendidikan di sekolah-sekolah unggulan. Yang terpenting dan harus dilakukan sekolah adalah memberikan pertanggungjawaban secara jujur, transparan, dan akuntabel.

OPTIMALISASI SUMBER DAYA STAKEHOLDERS

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) salah satunya bergantung pada peranan masyarakat. Selama ini peranan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penggalangan dana yang disalurkan melalui wadah yang dulu dikenal dengan nama Badan Pembantu Pelaksana Pendidikan (BP3). Saat ini peranan BP3 telah digantikan lembaga semacam *Board of Education*, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Ikatan Wali Peserta didik (Ikwam). Sementara berkaitan dengan masalah strategis, seperti penyusunan visi, misi, dan Rencana Induk Pengembangan (RIP), masyarakat belum dilibatkan

Jika belajar pada pengalaman negara yang maju di bidang pendidikan maka pasti ditemukan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam pendidikan biasanya diwujudkan melalui lembaga seperti *School Council*, *Parent and Community Association*, dan *Parent and Teacher Association*. Semua lembaga ini memiliki kewenangan terlibat bersama sekolah menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan *curriculum statement* dan *curriculum profiles* yang dikeluarkan pemerintah.

Secara jujur harus diakui masyarakat kita masih sangat sulit diajak terlibat aktif dalam pendidikan. Hal ini

salah satunya dikarenakan adanya *impresi* yang salah dari masyarakat mengenai pendidikan. Misalnya, dikatakan bahwa tanggung jawab pendidikan mutlak berada di sekolah. Sementara keluarga dianggap tidak memiliki kontribusi apa pun terhadap kesuksesan anak. Padahal jika mau realistis, waktu anak tentu lebih banyak dihabiskan dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dibanding di sekolah.

Menurut survei PERC (berbasis di Hongkong), sistem pendidikan Indonesia dianggap terburuk di kawasan Asia. Sistem pendidikan Indonesia menurut PERC ditempatkan pada peringkat 12 dari 12 negara, setingkat di bawah Vietnam. Dalam hal ini PERC telah menganalisis sistem pendidikan 12 negara di Asia dengan menggunakan tiga indikator. Yakni, *impresi* masyarakat mengenai sistem pendidikan, penguasaan teknologi, serta penggunaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.

Bukan hanya PERC, laporan *Human Development Index* (HDI) juga menyatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia berada pada urutan 102 dari 164 negara. Demikian juga dengan laporan *Internasional Institute for Development* (IID) yang menempatkan sistem pendidikan Indonesia pada peringkat 49 dari 49 negara. Kenyataan tersebut jelas merupakan sesuatu yang sangat ironi. Apalagi jika dikatakan bahwa sistem pendidikan kita kalah dengan Malaysia yang pada era 1980-an masih belajar di Indonesia.

Terkait faktor dukungan masyarakat, sebenarnya persoalan utama yang dihadapi adalah kurangnya kreativitas sekolah melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk memajukan pendidikan. Dalam hal ini masyarakat harus dipahami sebagai kelompok yang berkepentingan terhadap kemajuan sekolah (*stakeholders*). Mereka dapat berposisi sebagai wali peserta didik, kyai, aparat pemerintahan, tokoh politik, profesional, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan alumni. Karena itulah penting dilakukan analisis *stakeholder*

sehingga sekolah mengetahui dan dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki.

Pihak sekolah juga harus menyadari bahwa bantuan yang diberikan *stakeholders* tidak hanya berupa dana. Dalam hal ini penting dipahami beberapa wujud sumber daya masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Misalnya, pemikiran, informasi, perlindungan hukum, kondisi *learning society*, serta bimbingan dan penyuluhan. Mobilisasi sumber daya masyarakat juga dapat berupa barang. Bagi masyarakat di pedesaan, menyumbang uang bisa jadi merupakan hal yang berat. Mereka mungkin akan senang jika diminta menyumbang sesuai dengan produk masyarakat. Misalnya, hasil pertanian, nelayan, dan industri. Sumbangan dalam bentuk barang inilah yang kemudian diuangkan dan digunakan untuk pengembangan sekolah.

Potensi sumber daya *stakeholders* juga dapat berupa bantuan bimbingan dan penyuluhan. Berkaitan dengan ini perlu dilakukan revitalisasi fungsi wadah Badan Penyuluhan (BP). Sebab, selama ini BP hanya digunakan sebagai tempat bimbingan bagi anak nakal. Padahal BP seharusnya mampu menjadi sarana *sharing of experience*, misalnya dengan mengundang orang tua yang memiliki anak berprestasi untuk dimintai penjelasan mengenai kiat mendidik anak.

Pengalaman orang tua ini dapat ditularkan kepada wali peserta didik lain. Fungsi yang demikian dapat disebut *parenting*. Aktualisasi fungsi *parenting* juga dapat diwujudkan dalam bentuk bimbingan belajar, kursus, dan *conversation club*. Secara umum barangkali dapat dikatakan bahwa belum banyak sekolah yang menempatkan wali peserta didik sebagai *parenting*. Akibatnya, potensi mereka belum dapat dioptimalkan oleh sekolah.

MENUMBUHKAN CIVIC VALUES DI PESANTREN

Sejak September 2006 hingga Agustus 2008, saya bersama teman-teman di Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat (PuSAPoM) terlibat dalam kegiatan *Civic Education in Madrasah Tsanawiyah Affiliated With Pesantren*. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF). Sasaran dari kegiatan ini adalah guru-guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education/PKn*) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang ada di pesantren. Pada tahun pertama dari kegiatan ini dilibatkan sekitar 90 guru PKn di MTs yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar, dan Kediri. Selanjutnya pada tahun kedua jumlah peserta menjadi lebih banyak, 120 guru PKn, di MTs Kabupaten Malang, Kediri, Blitar, dan Lamongan.

Kegiatan tersebut tergolong menarik karena menjadikan lembaga pendidikan sebagai sarana penanaman nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) dengan cara menempatkan guru PKn di MTs sebagai ujung tombak. Lebih dari itu, penentuan lembaga pendidikan yang ada di pesantren sebagai sasaran kegiatan merupakan pilihan yang tepat. Sebab, jika kita berbicara mengenai pesantren tentu yang terbayang dalam

benak pikiran adalah institusi pendidikan Islam tradisional yang memiliki kultur kyai sentris, sulit berubah, eksklusif, dan kumuh. Dengan kultur seperti ini rasanya penanaman *civic values* di pesantren akan menghadapi persoalan besar. Meski demikian, harus diakui bahwa saat ini telah banyak pesantren yang telah mampu menampilkan wajah sebaliknya; modern, adaptif, inklusif, dan bersih.

Kegiatan penanaman nilai-nilai kewarganegaraan melalui lembaga pendidikan bisa jadi merupakan investasi jangka panjang. Sebab, melalui kegiatan inilah diharapkan akan terjadi proses sosialisasi, diseminasi, serta aktualisasi konsep, sistem nilai, dan budaya demokrasi melalui pendidikan. Penyebaran nilai-nilai kewarganegaraan dirasa menemukan momentumnya seiring dengan kondisi bangsa kita yang sedang mengalami masa transisi dalam berdemokrasi. Dalam jangka panjang kegiatan ini juga diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang paham mengenai makna demokrasi dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sayangnya, untuk menyukseskan program ini tentu bukan perkara yang mudah. Apalagi ini berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) yang tentu telah memiliki kultur tersendiri. Meski barangkali akan memunculkan resistensi, tetapi dengan keinginan yang kuat untuk mengubah kultur di masyarakat (termasuk di pesantren), rasanya usaha untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kewarganegaraan di pesantren bukan sesuatu yang mustahil di-realisasikan. Bukankah ajaran mengenai demokrasi sebagai salah satu pilar *civic values* juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam ajaran agama Islam?

Berdasar hasil kajian tim peneliti di PuSAPoM, ternyata pada sebagian besar guru Pendidikan Agama Islam dan guru PKn di MTs, putra kyai (Gus), serta kyai, sungguh-

nya telah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang kewarganegaraan (*civic knowledge*). Tetapi, sangat disayangkan jika pemahaman yang baik tersebut belum teraktualisasikan dalam bentuk sikap dan watak (*civic disposition*) dan perilaku sehari-hari (*civic skill*).

Gejala ini cukup menunjukkan bahwa dalam tingkat tertentu mereka telah mengalami kepribadian yang terbelah (*split personality*). Mereka dapat memahami dengan baik makna demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan masyarakat madani (*civil society*). Tetapi, jika mencermati watak, sikap, dan perilaku yang ditunjukkan tampak jelas bahwa mereka belum sepenuhnya menunjukkan pribadi yang berjiwa demokratis. Hal ini di antaranya dapat diamati dari sikap mereka terhadap berbagai persoalan aktual, seperti toleransi, pluralisme, egalitarianisme, proses pengambilan keputusan, dan praktik pembelajaran di kelas.

Bahkan pada sebagian komunitas pesantren tampak masih ada upaya untuk menyeragamkan tata cara (*kaifiyah*) ibadah. Padahal persoalan *kaifiyah* ibadah jelas merupakan bagian dari masalah *furu'iyah* yang senantiasa diperdebatkan dan hingga kapan pun tidak akan dapat dipertemukan. Tentu saja kenyataan seperti ini cukup menjadi bukti bahwa sebagian komunitas pesantren belum memberikan pengakuan terhadap pluralitas pendapat di kalangan pesantren.

Padahal dalam kenyataannya, keragaman dan kemajemukan merupakan suatu keniscayaan. Apalagi dalam ajaran Islam jelas dikatakan bahwa perbedaan pendapat (di kalangan umat yang terpelajar) adalah rahmat. Komunitas madrasah dan pesantren jelas termasuk kelompok terpelajar sehingga memungkinkan tumbuh sifat setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*).

Sementara dalam kaitan dengan pola hubungan guru dan

peserta didik, serta santri dan kyai, juga masih menunjukkan adanya kesenjangan. Jika dalam *civic values* diajarkan prinsip-prinsip kesetaraan (egalitarianisme), maka yang sering terjadi dalam hubungan guru dan peserta didik di madrasah serta hubungan santri dan kyai di pesantren, masih tampak jelas diwarnai kultur feodal dan patrimonial. Hal ini di antaranya dapat diamati dalam proses pembelajaran, baik di madrasah maupun pesantren. Di madrasah biasanya praktik pembelajaran yang dominan adalah ceramah. Hampir tidak ada kesempatan bagi seorang peserta didik untuk berinteraksi secara dialogis dengan gurunya. Pembelajaran yang searah (monolog) jelas menunjukkan belum berkembangnya nilai-nilai demokrasi di madrasah dan pesantren.

Sementara di pesantren, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan sistem sorogan, berasal dari kata *sorog* (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan. Pada pembelajaran model sorogan setiap santri menyodorkan kitab yang telah dibaca di hadapan kyai atau pembantu kyai (*bada'l*). Sistem sorogan ini termasuk belajar secara individual, di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru. Di pesantren juga dikenal metode pembelajaran wetonan/bandongan. Istilah *weton* ini berasal dari kata *wektu* (bahasa Jawa) yang berarti waktu. Dinamakan metode wetonan karena pembelajaran kitab kepada santri dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya sebelum atau sesudah shalat fardlu.

Metode wetonan ini merupakan metode kuliah, di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai yang menerangkan pelajaran seperti halnya kuliah. Di sini santri menyimak kitab masing-masing dan membuat beberapa catatan yang dianggap penting. Melengkapi metode sorogan dan wetonan/bandongan, di pesantren juga mengenal metode musyawarah (*bahtsul masa'il*), hapalan, praktik

ibadah, dan ceramah/pengajian. Sangat disayangkan jika metode-metode pembelajaran di pesantren belum memberikan ruang yang leluasa bagi santri untuk dapat berinteraksi secara timba balik dengan ustadz atau kyai.

Kultur di pesantren juga belum memberikan peluang yang memungkinkan *stakeholders* dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan kultur kepemimpinan kharismatik yang dikembangkan di pesantren. Kyai dapat memegang peranan yang sangat dominan dalam keseluruhan proses pengambilan kebijakan. Tidak heran jika posisi kyai dan keluarganya menjadi sangat sentral. Rasanya tidak dapat dibayangkan apa jadinya jika ada santri yang berani bertanya kepada pengelola pesantren mengenai transparansi keuangan. Barangkali peserta didik tersebut akan langsung dikatakan sebagai telah berlaku buruk (*su'ul adab*).

Seluruh persoalan tersebut semakin menambah keyakinan bahwa penanaman *civic values* melalui lembaga pendidikan, khususnya madrasah dan pesantren menjadi sangat penting. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan. Maka lembaga pendidikan akan dinilai berhasil jika mampu meletakkan dasar-dasar kehidupan yang demokratis bagi peserta didiknya.

URGENSI PENDIDIKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tidak diragukan lagi, Surabaya kini sedang memantapkan *branding* baru sebagai kota hijau dan bersih. Melalui fasilitas taman yang tersedia di beberapa sudut kota, warga metropolis seakan dimanjakan dengan sarana bermain sambil menikmati indahnya tetumbuhan dan udara yang segar. Kesadaran warga kota terhadap lingkungan juga semakin meningkat. Untuk mengapresiasi kesadaran warga, pemerintah kota Surabaya juga mengadakan even tahunan melalui program *Awarding Surabaya Green and Clean*. Melalui program ini kampung-kampung di Surabaya diajak untuk beradu bersih, sehat, dan hijau.

Program Surabaya *Green and Clean* terasa akan semakin masif dampaknya jika pemerintah juga bersinergi dengan berbagai komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan. Khusus lembaga pendidikan, kini beberapa sekolah juga sedang mengembangkan pendidikan *clean, green, and hygiene* (CGH). Melalui program ini sekolah ingin menjadikan tempat belajar peserta didik bersih, sehat, dan hijau. Pendidikan CGH bertujuan untuk menanamkan kesadaran berbagai komponen di sekolah mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Dengan menjadikan

lingkungan bersih, sehat, dan hijau, berarti lembaga pendidikan turut mengatasi problem pemanasan global (*global warming*).

Pendidikan CGH sangat mungkin dikembangkan dengan prinsip tidak menambah beban kurikulum. Ini berarti seluruh unsur di sekolah, mulai kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua, tidak perlu khawatir dengan kehadiran pendidikan CGH. Sebab, pendidikan CGH dapat ditempuh dengan cara menyisipkan (*inserting*) pada mata pelajaran yang relevan. Dengan metode ini berarti materi CGH tidak akan pernah menjadi mata pelajaran tersendiri.

Unsur-unsur di sekolah perlu disadarkan mengenai pentingnya menjaga lingkungan agar bersih, sehat, dan hijau. Dengan kondisi lingkungan seperti itu, peserta didik akan merasa nyaman belajar. Realitas memang menunjukkan bahwa sekolah umumnya tidak memiliki lahan yang cukup untuk bercengkerama dan bermain bagi peserta didik. Akibatnya, peserta didik merasa bosan jika harus berlama-lama di sekolah karena lingkungannya panas, pengap, dan berdebu.

Pada konteks inilah pendidikan CGH mutlak diperlukan. Yang perlu ditekankan bahwa untuk menjadikan sekolah berwawasan lingkungan hidup sesungguhnya dapat ditempuh dengan cara yang mudah. Misalnya, pengadaan tanaman yang ditempatkan di teras depan kelas. Meski terkesan sederhana tetapi banyak sekolah yang belum melakukan hal ini. Padahal cara ini dapat menyebabkan udara terasa segar dan lingkungan pun menjadi hijau.

Pilihan untuk menyisipkan materi CGH dalam beberapa mata pelajaran didasarkan pada kenyataan bahwa kurikulum yang ada sudah sangat gemuk. Pembelajaran materi CGH pun dapat dilakukan dengan cara yang demonstratif. Misalnya, dengan membawa masuk tempat sampah yang sudah ditulis sampah kering

dan sampah basah, atau sampah organik dan sampah anorganik. Guru cukup menjelaskan secara singkat jenis sampah dan selanjutnya peserta didik diajak berburu sampah yang ada di sekolah. Itu menunjukkan bahwa materi CGH tidak mesti diajarkan di kelas. Peserta didik dapat diajak berkeliling untuk mengamati problem lingkungan yang terjadi di sekolah dan sekitarnya.

Proses pembelajaran tersebut dinamakan berparadigma konstruktivis. Melalui metode konstruktivis peserta didik memperoleh pengalaman mengamati lingkungan, menemukan problem yang dihadapi, dan terlibat aktif merumuskan solusinya. Akhirnya, peserta didik menemukan alternatif jawaban dari hasil kerja sama dengan temannya. Pasti banyak kejadian menarik yang dapat ditemukan selama proses pembelajaran materi CGH di luar kelas.

Misalnya, jika ditemukan puntung rokok yang dibuang di sembarang tempat, maka peserta didik akan menyatakan bahwa ada guru yang merokok tapi tidak membuang sampah di tempatnya. Demikian juga ketika ditemukan bekas bungkus makanan yang berserakan, peserta didik akan saling mengingatkan. Jika pembelajaran materi CGH dilakukan dengan benar, menyenangkan, dan berkelanjutan, pasti dapat membangun budaya hidup bersih, sehat, dan hijau. Melalui cara ini peserta didik dapat dijadikan agen perubahan kultur di lingkungan sekitarnya sehingga lebih bersih, sehat, dan hijau.

Pembelajaran materi CGH juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, kegiatan keterampilan yang memanfaatkan sampah sebagai bahan dasar. Seorang guru dapat menjelaskan bahwa jenis sampah kering berupa plastik dan kertas termasuk yang sulit dihancurkan. Karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan plastik dan kertas sebagai bahan dasar

berbagai jenis keterampilan. Sementara untuk sampah basah peserta didik dapat diajari membuat kompos yang bermanfaat untuk memupuk tanaman. Melalui cara ini berarti guru telah mengajarkan peserta didik untuk mengatasi problem sampah dengan *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Kegiatan ekstrakurikuler di bidang kesehatan juga dapat dijadikan media pembelajaran materi CGH melalui gerakan cuci tangan pakai sabun (CTPS). Peserta didik perlu dijelaskan bahwa mencuci tangan saja tidak cukup untuk menghilangkan bakteri yang melekat di tangan. Karena itu, mencuci tangan harus menggunakan sabun agar benar-benar bersih. Melalui pembelajaran ini peserta didik memperoleh pengalaman cara yang benar dan waktu yang penting untuk CTPS. Waktu yang penting CTPS adalah sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum memegang bayi, sebelum menceboki anak, dan sebelum menyiapkan makanan.

Kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun kelihatan sepele. Padahal banyak manfaat yang dapat diperoleh dari CTPS. Salah satunya adalah dapat menghindarkan diri dari ancaman penyakit diare. Menurut data *World Health Organization* (WHO) dikatakan bahwa diare dan pnemonia telah merenggut nyawa 3,5 juta balita setiap tahun. Data Kementerian Kesehatan RI pada 2006 juga menunjukkan bahwa diare telah menyebabkan 100 ribu anak Indonesia tidak sempat menikmati ulang tahunnya yang ke-5. Karena itulah pendidikan berwawasan lingkungan perlu ditanamkan sejak dini melalui pembiasaan hidup yang sehat pada anak-anak.

PENCEGAHAN HIV/AIDS MELALUI PENDIDIKAN

Seluruh dunia memperingatkan hari AIDS tepat pada 1 Desember. Di tengah peringatan hari AIDS dunia 2011 kita dikejutkan oleh hasil survei Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyatakan separo remaja perempuan telah mengadakan hubungan seks sebelum menikah, bahkan sebagian telah hamil. Rentang usia yang disurvei adalah 13-18 tahun. Hasil survei ini jelas sangat menyedihkan karena salah satu pintu masuk penularan HIV/AIDS adalah melalui seks bebas. Data Departemen Kesehatan RI dikatakan bahwa terdapat 50,07 persen kasus AIDS dialami oleh kelompok usia produktif 20-29 tahun dan 30-39 tahun.

Ini menunjukkan bahwa kelompok remaja sangat rentan tertular virus HIV/AIDS. Tentu saja, angka tersebut hanya didasarkan pada kasus yang diketahui berdasarkan laporan dan pemeriksaan di rumah sakit dan puskesmas. Sebab, sejujurnya fenomena HIV/AIDS seperti gunung es. Artinya, kelihatan sedikit di permukaan, tetapi yang belum diketahui sangat mungkin jauh lebih banyak.

Beberapa hasil penelitian juga menyatakan bahwa populasi tertinggi orang beresiko terkena HIV/AIDS ada-

lah pengguna napza suntik dan pasangannya, pekerja seks dan pelanggannya, waria dan pelanggannya, kelompok homoseksual, narapidana, dan transmisi prenatal. Khusus kelompok remaja, penyebab utama peningkatan penderita HIV/AIDS adalah karena mereka telah menjadi pecandu napza (narkotika, zat adiktif, dan psikotropika) melalui jarum suntik dan berperilaku seks bebas.

Di antara penyebab yang sangat mungkin mempengaruhi perilaku remaja sehingga rawan tertular HIV/AIDS adalah tiadanya informasi yang benar mengenai virus tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok remaja, terutama mereka yang sedang belajar di bangku sekolah, perlu dikenalkan bahaya penyakit HIV/AIDS. Pengenalan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan kecakapan hidup (*life skill*) untuk melakukan usaha preventif bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Dengan demikian, lembaga pendidikan sesungguhnya dapat dijadikan sarana yang efektif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS.

Pengenalan HIV/AIDS melalui pendidikan juga dapat digunakan untuk menumbuhkan sikap berempati peserta didik terhadap penderita penyakit tersebut. Sebab, selama ini masyarakat terlanjur memberikan stigma negatif pada penderita HIV/AIDS. Misalnya, dikatakan bahwa penyakit HIV/AIDS adalah kutukan Tuhan. Penderita HIV/AIDS juga distigma sebagai orang yang telah berbuat dosa besar sehingga mendapat karma dari Tuhan. Karena itu penderita HIV/AIDS harus dikucilkan dari pergaulan.

Padahal dalam banyak kasus HIV/AIDS ditemukan bahwa seorang ibu rumah tangga yang baik sekalipun berpotensi terkena penyakit ini karena tertular dari suaminya. Seorang bayi yang tidak bersalah pun dapat terlahir dalam kondisi sudah positif HIV/AIDS karena tertular dari ibu-

nya. Kejadian ini menunjukkan bahwa penyebaran virus HIV tidak pernah pandang bulu.

Mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan penyakit HIV/AIDS maka informasi yang memadai mengenai penyakit ini sedini mungkin harus diberikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan. Melalui lembaga pendidikan kelompok remaja juga dapat memperoleh penjelasan bahwa HIV/AIDS tidak menular melalui interaksi sosial, seperti berjabat tangan, olah raga bersama, penggunaan kolam renang dan toilet bersama, serta bertukar alat makan. Karena itu memberikan stigma negatif dan bersikap diskriminatif terhadap penderita HIV/AIDS menjadi tidak benar.

Dalam konteks ini peserta didik dapat dijadikan agen memberikan informasi yang benar bahwa tidak ada halangan untuk melakukan kontak sosial dengan penderita HIV/AIDS. Ini berarti bahwa dalam kasus HIV/AIDS yang perlu dimatikan adalah penyakitnya, bukan orangnya.

Pencegahan HIV/AIDS melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara menyisipkan (*inserting*) dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Ini dimaksudkan agar peserta didik tidak terbebani dengan tambahan mata pelajaran baru. Hal ini perlu ditegaskan sebab tuntutan kurikulum terhadap peserta didik sudah demikian berat.

Yang terpenting adalah peserta didik memiliki kesadaran bahwa HIV/AIDS adalah jenis penyakit yang berbahaya, dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia, dan hingga kini belum ditemukan obatnya. Selain melalui sinergi dengan mata pelajaran dan kegiatan ekstra, pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan cara yang simpatik, seperti melalui pengajian, spanduk, *poster card*, musik, dan teater. Pesan jangan pernah mencoba narkoba dan *say not to drug and free sex*, harus selalu dikampanyekan di lingkungan sekolah.

Untuk mendukung program pencegahan HIV/AIDS di sekolah dapat dibentuk *Peer Education* (PE). PE dapat diartikan sebagai proses perkembangan pengetahuan, kepercayaan, sikap, dan perilaku yang dilaksanakan seseorang kepada teman sebayanya. Untuk membentuk PE langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi peserta didik yang memiliki kesamaan karakter seperti usia, latar belakang sosial, dan jenis kelamin. Pendidikan melalui teman sebaya ini penting karena biasanya seseorang memiliki kecenderungan hanya mau belajar, mendengarkan nasehat, dan mencontoh perilaku orang lain yang memiliki kesamaan karakter dengan dirinya.

Dua perilaku remaja yang sangat rentan menjadi penyebab penularan HIV/AIDS adalah penggunaan jarum suntik napza secara bergantian dan seks bebas. Ini berarti lembaga pendidikan harus memberikan kontribusi riil untuk melakukan pencegahan. Berkaitan dengan hal ini unsur-unsur di lembaga pendidikan harus bersinergi untuk membentuk *peer group* dengan harapan agar penyebaran penyakit HIV/AIDS di kalangan remaja dapat diminimalkan. Kebersamaan pihak sekolah dan *peer group* ini mutlak diperlukan untuk mengawasi peserta didik agar tidak terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang dan pergaulan bebas.

Untuk kepentingan inilah sekolah perlu memberikan *life skill* pencegahan HIV/AIDS sejak dini. Hanya dengan cara inilah lembaga pendidikan dapat memberikan kontribusi untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya HIV/AIDS.

MASA DEPAN PTAI

Masyarakat selama ini mengenal Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) negeri dan swasta sebagai institusi pendidikan tinggi yang menekuni kajian ilmu-ilmu keislaman (*Islamic studies*). Kesan ini memang tidak salah, meski sejak awal 2000 sebagian PTAI Negeri telah membuka program studi umum seperti komunikasi, psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, matematika, sains, bahkan kedokteran. Diversifikasi program studi ini dimaksudkan untuk menyongsong era persaingan antar perguruan tinggi yang kian kompetitif.

Strategi membuka program studi umum ini ternyata mampu meningkatkan minat masyarakat untuk belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN). Hal ini dapat diamati melalui peserta Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SN PTN). Bahkan beberapa program studi di IAIN dan UIN seperti ekonomi Islam, komunikasi, psikologi, dan kedokteran, memperoleh peminat yang cukup banyak. Ini berarti beberapa program studi yang dikembangkan PTAI sesungguhnya dapat bersaing dengan perguruan tinggi umum.

Disamping pertimbangan untuk meningkatkan peminat, PTAI juga mulai menyadari urgensi penyatuan berbagai

disiplin ilmu sehingga tidak terjadi pemisahan ilmu agama dan ilmu umum. Sebab selama kajian ilmu agama dan ilmu umum dilakukan secara terpisah sehingga hasilnya pasti parsial (*separated studies*). Dengan menjadikan kajian ilmu agama dan ilmu umum sebagai satu kesatuan maka akan terwujud pendekatan yang saling terkait (*interconnected approach*). Pendekatan interkoneksi ini penting agar produk keilmuan memiliki sandaran nilai-nilai moral-agama.

Pengembangan program studi umum di PTAI dengan sendirinya akan berimplikasi pada perubahan kelembagaan dari institut menjadi universitas. Karena itu banyak IAIN kini telah berubah menjadi UIN. Meski harus diakui, bahwa di internal Kementerian Agama (Kemenag) sesungguhnya terjadi silang pendapat tatkala beberapa IAIN berubah menjadi UIN.

Mereka yang menolak menyatakan bahwa perubahan itu pada saatnya akan mengakibatkan marginalisasi program studi ilmu-ilmu keislaman yang selama ini menjadi *core of competence* PTAI. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana masa depan sumber daya yang selama ini dipersiapkan untuk mengembangkan kajian ilmu-ilmu keislaman? Sementara mereka yang mendukung lebih menekankan pada tantangan yang dihadapi PTAI. Apalagi realitas menunjukkan bahwa peminat program studi ilmu-ilmu keislaman terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Mencermati fenomena tersebut berarti PTAI perlu melakukan diversifikasi program studi untuk disesuaikan dengan minat masyarakat. Dalam ilmu pemasaran (*marketing*) dikatakan bahwa salah satu syarat agar produk, termasuk jasa pendidikan, diminati pelanggan adalah harus ada kejelasan *brand* (merek atau label). Dalam perspektif ini berarti penting dipikirkan *brand* yang tepat bagi ilmu-ilmu keislaman yang dikembangkan PTAI.

Pemberian merek ini tentu berkaitan dengan *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Misalnya, harus ditentukan bahwa

lulusan PTAI adalah pribadi yang berakhlak mulia, ahli ilmu agama, menguasai ilmu-ilmu alat (bahasa Arab dan bahasa Inggris), hafal al-Qur'an, dan memiliki seperangkat ketrampilan (*vocational skill*) yang dibutuhkan masyarakat. Jika lulusan yang dicetak PTAI seperti ini rasanya tidak ada lagi yang perlu diragukan. Lulusan PTAI pasti individu yang bermutu sehingga berdaya saing tinggi. Dengan lulusan yang demikian, maka kepercayaan masyarakat pasti meningkat.

Branding yang juga penting diwujudkan adalah menjadikan PTAI sebagai pusat kajian ilmu-ilmu keislaman (*center for Islamic studies*). Ini berarti IAIN dan UIN harus menjadikan ilmu-ilmu keislaman sebagai yang terutama. Ini penting ditekankan karena banyak persoalan sosial keagamaan yang sesungguhnya membutuhkan sumbangsih IAIN dan UIN. Dintaranya adalah terorisme dan radikalisme sosial bernuansa agama yang berpotensi muncul setiap saat. Pertanyaannya, apa yang dikontribusi PTAI untuk mengatasi persoalan tersebut? Disinilah perlu pemikiran agar PTAI menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sosial keislaman.

Di samping menentukan *brand*, PTAI juga harus jeli melihat siapa sesungguhnya yang menjadi peminat dan pengguna lulusan (*user*). Secara konvensional dapat dikatakan bahwa peminat PTAI selama ini adalah lulusan lembaga pendidikan keislaman seperti madrasah dan pesantren. Jika pandangan ini benar berarti harus ada kerjasama yang saling menguntungkan antara PTAI dengan madrasah dan pesantren.

Mengenai pengguna lulusan memang sulit dijawab. Sebab, PTAI terkadang tidak mempersiapkan secara serius agar lulusannya menguasai bidang yang dibutuhkan pasar. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan tidak memiliki kecakapan minimal yang dibutuhkan agar dapat bersaing dalam kehidupan. Inilah tantangan terbesar yang dihadapi PTAI.

Sebab harus disadari, pendidikan tidak sekedar mempelajari ilmu di bangku kuliah. Yang lebih penting adalah menyiapkan lulusan yang siap menghadapi problem kehidupan.

Dalam *marketing* juga diajarkan pentingnya memahami hubungan *positioning*, *differentiation*, dan *branding* (PDB). Pola hubungan PDB ini dapat dipahami bahwa posisi tawar suatu produk jasa akan baik jika memiliki perbedaan keunggulan dari yang lain. Menentukan keunggulan yang berbeda inilah yang disebut *differentiation*. Agar produk memiliki perbedaan maka yang diperlukan adalah menentukan *brand*. Dan, diferensiasi *brand* yang telah ditentukan harus dikomunikasikan secara terus-menerus pada *user* agar posisinya lebih kuat.

Dengan menggunakan pola hubungan PDB dalam *marketing*, berarti PTAI sejak dini harus menentukan *brand* untuk kajian ilmu-ilmu keislaman. Penentuan *brand* ini penting agar lulusan PTAI mampu menunjukkan keunggulan yang berbeda dengan lulusan perguruan tinggi umum. Selain memperhatikan *user*, PTAI juga harus mampu melihat perguruan tinggi pesaing (*competitor*). Kejelian melihat *user* dan *competitor* ini menjadi faktor penting untuk menentukan *marketing* dan *branding* PTAI.

Nah, tugas berat PTAI kini adalah melakukan *marketing* dan *branding* program-program studi yang dikembangkan. Konsekuensinya, PTAI tidak boleh dikelola asal-asalan, melainkan harus profesional. Hanya dengan cara inilah PTAI akan dapat eksis di tengah persaingan pendidikan tinggi yang kian kompetitif. Problem demoralisasi bangsa ini, seperti tercermin dalam banyak kasus korupsi dan ketidakjujuran, rasanya membutuhkan sentuhan civitas akademika PTAI. Mampukah?

SETELAH IAIN TIDAK BISA JADI UNIVERSITAS

Berita mengenai larangan IAIN menjadi UIN oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni telah memupus harapan beberapa kalangan di IAIN Sunan Ampel yang selama ini berkeinginan menjadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Surabaya tersebut menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Alasan yang dikemukakan Menteri Agama adalah bahwa perubahan IAIN menjadi UIN telah menjadikan IAIN tidak lagi fokus kepada jurusan keagamaan. UIN telah merambah jauh ke dunia praktis.

Fenomena ini dapat diamati dari beberapa UIN seperti di Jakarta, Yogyakarta, Malang, Riau, Medan dan Makasar. Padahal secara historis alasan didirikan IAIN oleh *the founding fathers* adalah untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman. Problemnya, sekarang ini pengaruh korporasi di dunia pendidikan telah semakin kuat. Orang tua menentukan pilihan terhadap program studi/jurusan bagi anaknya dilatarbelakangi oleh segudang harapan. Yang paling dominan adalah kalkulasi dan pertimbangan praktis.

Sebenarnya sejak awal 2000 keinginan mengubah IAIN Sunan Ampel menjadi UIN telah menjadi wacana yang demikian kuat. Hanya saja, keinginan tersebut be-

lum dapat direalisasikan karena memang para pengambil kebijakan (*decision maker*) IAIN Sunan Ampel ketika itu kurang memberikan respon. Anehnya dalam waktu bersamaan di IAIN Sunan Ampel juga mulai di kembangkan program studi/jurusan umum, seperti sosiologi, komunikasi dan psikologi. Pengembangan program studi umum di IAIN diakui atau tidak merupakan cermin keinginan mengubah IAIN menjadi UIN.

Keberadaan prodi umum di IAIN telah menunjukkan tren yang positif. Bahkan di beberapa fakultas, program studi umum telah mengalahkan program studi/jurusan keagamaan. Jika ini terus terjadi, bisa jadi program studi/jurusan keagamaan akan semakin kecil peminatnya. Pertanyaannya, akankah kita bertahan dengan mengembangkan jurusan keagamaan, sementara minat masyarakat demikian kecil?

Jika kita memilih mempertahankan yang ada, berarti diperlukan pemikiran kreatif untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat kepada IAIN. Bahkan IAIN juga harus lebih mendekatkan diri dengan lembaga-lembaga pendidikan keislaman mulai dari pesantren hingga madrasah. Pada kedua lembaga pendidikan keislaman itulah sesungguhnya basis IAIN. Karenanya menjadi penting diamati komitmen IAIN untuk turut serta mengembangkan pendidikan keislaman.

Jika merujuk pada pengertian yang diberikan Ibn Khaldun (w. 1406), ilmu-ilmu keislaman (*islamic sciences*) secara konvensional dapat dipahami sebagai cabang-cabang keilmuan yang dikembangkan di institusi-institusi pendidikan Islam, meliputi: penafsiran al-Qur'an (*Quranic exegesis*), studi Hadits, kalam, fikih dan tasawuf. Ibn Khaldun menamakan jenis keilmuan seperti ini dengan ilmu-ilmu tradisional/konvensional (*traditional/conventional sciences*). Jenis keilmuan seperti tafsir, hadits, kalam, fikih dan

tasawuf itulah yang diajarkan di sebagian besar lembaga pendidikan Islam sejak masa klasik hingga sekarang ini.

Sistem pendidikan di Indonesia juga memahami disiplin Ilmu Agama Islam sebagai bidang spesialisasi keilmuan yang dikembangkan dalam lingkungan PTAI, seperti: Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Menurut keputusan Menteri Agama Nomor 110 tahun 1982, Ilmu Agama Islam dikelompokkan dalam delapan bidang keilmuan, yaitu; (1) Qur'an dan Hadits, (2) Pemikiran Dalam Islam, (3) Fikih (Hukum Islam) dan Pranata Sosial, (4) Sejarah dan Peradaban Islam, (5) Bahasa dan Sastra Arab, (6) Pendidikan Islam, (7) Dakwah Islamiyah, dan (8) Pemikiran Modern Dalam Islam.

Penyebaran kedelapan bidang kajian Ilmu Agama Islam itu tercermin dalam Surat Keputusan Menteri Agama nomor 27 tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S-1) IAIN/STAIN, yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Agama nomor 383 tahun 1997, yang juga berlaku bagi PTAIS. Bidang keahlian itu tampak dalam program studi (jurusan) yang dikembangkan UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS. Sebaran delapan bidang keahlian Ilmu Agama Islam, meliputi: Fakultas Tarbiyah (Tarbiyah Islamiyah), Fakultas Dakwah (Dakwah Islamiyah), Fakultas Adab (Bahasa-Sastra Arab dan Sejarah Peradaban Islam), Fakultas Syari'ah (Hukum dan Pranata Sosial Islam) dan Fakultas Ushuluddin (Qur'an-Hadits, Pemikiran Islam dan Perkembangan Modern Dalam Islam).

Harus diakui bahwa sejak beberapa IAIN mengubah statusnya menjadi UIN telah menyebabkan pergeseran dan sekaligus pengembangan delapan bidang kajian Ilmu Agama Islam. Bahkan pada beberapa UIN, penamaan fakultas pun turut berubah, misalnya saja di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin kini berubah nama menjadi Fakultas Ushuluddin dan Ilmu-ilmu Humaniora. Perubahan nama fakultas ini sekaligus mengubah konsentrasi (jurusan) yang dikembangkan.

Jika sebelumnya di Fakultas Ushuluddin ketika masih berstatus IAIN hanya mengembangkan tiga jurusan: Aqidah Filsafat (AF), Perbandingan Agama (PA) dan Tafsir Hadits (TH), maka setelah menjadi UIN juga dikembangkan Program Studi Politik Islam, Sosiologi Agama dan Psikologi Agama. Bahkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini juga dikembangkan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat bekerjasama dengan Universitas Indonesia.

Fenomena tersebut jelas menunjukkan keinginan kuat di kalangan PTAI untuk mengembangkan disiplin kajian Ilmu Agama Islam, bukan sekedar ilmu-ilmu tradisional (Qur'an, Hadits, Kalam, Fikih dan Tasawuf), melainkan juga disiplin keilmuan yang selama ini dikembangkan di perguruan tinggi umum. Tentu saja, fenomena ini juga harus dipahami sebagai tradisi baru, di mana kajian ilmu-ilmu keislaman tidak bisa dilakukan secara terpisah (*separated*) dari ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dan ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*).

Dengan cara seperti inilah kajian Ilmu Agama Islam dapat dikembangkan dalam bentuknya sebagai studi yang bersifat interkoneksi (*interconnected study*). Jadi tidak seperti yang selama ini terjadi, misalnya orang belajar agama harus di IAIN, STAIN dan PTAIS, sementara belajar ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman harus di perguruan tinggi umum. Jika ini yang terjadi, dikotomi ilmu agama dan umum jelas akan berjalan terus.

Departemen Agama di era kepemimpinan Maftuh Basyuni telah menutup peluang bagi munculnya UIN baru. Ini berarti keinginan mengintegrasikan ilmu agama dan umum secara institusional tidak mungkin lagi di-

lakukan. Tentu saja keputusan ini harus disikapi dengan positif. Dalam konteks ini IAIN harus kembali kepada jati dirinya semula dengan mengembangkan kajian ilmu-ilmu keislaman. Sesuatu yang barangkali dapat disebut peluang (*opportunity*) adalah sekarang ini kondisi masyarakat sangat membutuhkan agama. Bahkan jika dikaitkan dengan problematika bangsa ini yang sedang menghadapi persoalan demoralisasi, peran institusi keagamaan seperti halnya IAIN tentu sangat dibutuhkan.

Maka problem yang muncul adalah bagaimana IAIN mampu mengemas kajian keislaman yang dikembangkan sehingga memiliki nilai jual. Sebagai langkah awal perlu kiranya dilakukan usaha berkelanjutan untuk menjadikan IAIN Sunan Ampel sebagai pusat pengkajian ilmu-ilmu keislaman (*center of Islamic studies*). Bukan hanya berhenti pada tataran kajian, tapi juga perlu dibangun *image* bahwa IAIN Sunan Ampel mampu menjadi teladan bagi penanaman nilai-nilai keislaman. Ini memang tidak mudah dilakukan, apalagi di Jawa Timur terdapat beberapa PTAI yang potensial menjadi kompetitor. Sebut saja misalnya, UIN Malang yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Langkah selanjutnya yang juga penting adalah membangun kerjasama (*networking*) dengan berbagai instansi untuk mencari terobosan agar *out put* IAIN Sunan Ampel dapat diterima secara lebih banyak di dunia kerja. Ilmu agama jelas memiliki pasar tersendiri. Yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan keterampilan yang kompetitif.